

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1964
TENTANG
PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STATISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 (di sempurnakan), pasal (6) ayat (3);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 dan 5 tahun 1962 (di sempurnakan) dan Keputusan Presiden Nomor 232 tahun 1963;
4. Ketetapan M. P. R. S. Nomor IV tahun 1963;
5. Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963 (di sempurnakan);
Memperhatikan: Saran-saran Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA NEGARA BAPPENAS URUSAN STATISTIK.

Pasal 1.

1. Membantu di lingkungan BAPPENAS sebuah Panitia Negara BAPPENAS Urusan Statistik yang bertanggung-jawab kepada Pimpinan BAPPENAS, dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Panitia.
2. Tugas Panitia adalah:
 - a. Mengadakan registrasi segala kegiatan statistik;
 - b. Merumuskan data-data statistik yang diperlukan pembangunan semesta, baik pada taraf perencanaannya, maupun pada taraf pelaksanaannya;
 - c. Merumuskan organisasi dan koordinasi kestatistikan yang setepat-tepatnya di Pusat dan di Daerah;
 - d. Mengajukan saran-saran mengenai sistem pengumpulan, penyampaian dan pengolahan statistik;
 - e. Membimbing secara terus-menerus penyempurnaan di bidang kestatistikan;
 - f. Menjalankan tugas-tugas lain di bidang statistik atas permintaan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 3.

3. Panitia diberi wewenang untuk:
 - a. Meminta kepada instansi-instansi dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Swasta untuk menjalankan sesuatu tugas eksekutif yang hasilnya diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia.
 - b. Meminta segala keterangan mengenai hal-hal yang termasuk

tugasnya dari segenap instansi dan Lembaga Pemerintah/Swasta, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pasal 4.

4. Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari Luar BAPPENAS.
5. Ketua Panitia dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
6. Ketua dan Wakil Ketua merangkap jadi anggota.

Pasal 5.

7. Anggota-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoalan statistik.
8. Jumlah anggota sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang pengangkatannya dilakukan dengan surat Keputusan Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 6

9. Atas usul Panitia, Pimpinan BAPPENAS dapat membentuk team-team kerja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu guna membantu Panitia.

Pasal 7.

10. Panitia mempunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang Sekretaris, dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang tenaga pembantu, yang semuanya termasuk staf pegawai BAPPENAS.

Pasal 8.

11. Pembiayaan Panitia di bebaskan atas Anggaran BAPPENAS.

Pasal 9.

12. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10.

13. Peraturan ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 1964.
Sekretaris Negara,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 23